# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki tugas untuk pembangunan terhadap sarana dan prasarana untuk masyarakat yang selama ini diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara pembangunan Negara.

Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan dibidang ekonomi. Tujuan dan sasaran pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur, perlu diusahakan adanya keserasian dan keselarasan dalam pemakaian Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) serta permodalan dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal ini berarti fungsi pembangunan pun telah di desentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan paradigma di atas menuntut

pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan unsur-unsur pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Mengurus rumah tangga daerah dan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, kinerja pemerintah daerah melalui kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditingkatkan. Pengelolaan sumber daya manusia terkait dan mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan dengan cara menciptakan nilai atau menggunakan keahlian sumber daya manusia yang berkaitan dengan praktek manajemen dan sasarannya cukup luas, tidak hanya terbatas aparatur pemerintah saja semata, namun juga meliputi tingkatan pemimpin.

Standar kinerja diatur untuk seluruh kinerja pemerintahan, unit-unit organisasi yang mendukungnya, serta kinerja orang yang berperan didalamnya. Unsur utama yang harus dinilai kinerjanya adalah unsur manusia atau aparatur, karena pegawai yang berperan dalam menentukan kinerja pemerintahan. Aparatur memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Peranan aparatur tersebut sesuai dengan tuntutan zaman terutama untuk menjawab tantangan masa depan. Aparatur yang berkualitas merupakan aparatur yang memiliki kecakapan dan kemampuan, yang sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan tersebut. Kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Hal lainnya adalah mampu memelihara dan mengembangkan kecakapan dan kemampuannya secara berkesinambungan. Tugas pimpinan pada setiap organisasi pemerintahan untuk memelihara dan membina semua aparatur agar dapat lebih

berkualitas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan.

Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 merupakan organisasi pemerintah yang berfungsi merumuskan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana jalan serta pengairan, melaksanakan tugas teknis operasional di bidang sarana dan prasarana jalan serta pengairan, serta melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan dinas. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung merupakan sebuah intansi pemerintah yang bergerak dalam penyediaan prasarana infrastruktur pendukung perekonomian dan kehidupan masyarakat. Infrastruktur diantaranya jalan dan drainase, sesuai dengan visi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu "Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Jalan Guna Dan Sumber Daya Air Guna Mendukung Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat".

Kegiatan program pemeliharaan jalan merupakan bagian dari pembangunan. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting keberadaannya di Kota Bandung. Keberadaan jalan menghubungkan wilayah yang ada di Kota Bandung beberapa diantaranya mempunyai aktifitas yang cukup tinggi, dengan demikian jalan tentulah sering digunakan oleh masyarakat. Jumlah masyarakat banyak menimbulkan kendaraan banyak serta menimbulkan kepadatan di jalan saat ini, maka keadaan fisik jalan sangatlah penting. Semua hal di atas adalah faktor pendukung kelancaran aktifitas masyarakat yang dilakukan setiap harinya.

Namun pada kenyataannya, keadaan fisik jalan di Kota Bandung masih jauh dari sempurna banyak jalan yang berlubang, dengan kata lain belum layak untuk digunakan dalam aktifitas intens. Banyak masyarakat meminta untuk segera memperbaiki kerusakan jalan yang ada. Seperti contoh kasus di bawah ini:

**Gambar 1.1**
**Perbaikan Jalan Rusak Dikebut**



BANDUNG– Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung mempercepat perbaikan jalan rusak hingga akhir tahun. DPRD menyesalkan proyek di penghujung tahun ini.Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman mengatakan, molornya pengerjaan perbaikan infrastruktur karena semua pekerjaan dikerjakan menjelang akhir tahun. ”Anggaran yang disahkan untuk DBMP sebesar Rp 200 miliar untuk 134 paket, tapi kebanyakan mereka malah dikerjakan di akhir tahun,”ujarnya, kemarin. Dia menyesalkan beberapa proyek perbaikan jalan dan infrastruktur masih banyak yang belum rampung. Tidak sedikit yang menimbulkan masalah, salah satunya kemacetan lalulintas. Kepala Dinas BinaMarga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung Iming Akhmad mengungkapkan, dari proyek jalan sebanyak 73 paket sudah selesai 56 paket. ”Sisanya yang 17 paket rata-rata berkisar 30-80%,” ucapnya. Untuk Jalan Ciumbuleuit sudah mencapai 95%.”Dan yang 5% untuk pekerjaan pengurukan bahu jalan dan hotmix dari ujung beton sebelah selatan kebawah,” katanya. Sementara untuk pengerjaan drainase dan trotoar, dari 35 paketpekerjaan, sebanyak 9 pakettelahselesai 100%.”Sisanya 26 paket rata-rata kemajuannya 20-80%,”tambahnya.
Sumber: (http://www.seputar-indonesia.com, 21/12/2012)

Berdasarkan berita di atas, aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan tugasnya tidak efektif dilihat dari penundaan pemeliharaan jalan yang diungkap pada berita di atas bahwa mundurnya pengerjaan pemeliharaan infrastruktur karena semua pekerjaan dikerjakan menjelang akhir

tahun. Padahal anggaran yang disahkan untuk DBMP sebesar Rp 200 miliar untuk 134 paket, tapi kebanyakan dikerjakan di akhir tahun. Beberapa proyek pemeliharaan jalan dan infrastruktur masih banyak yang belum rampung dan tidak sedikit yang menimbulkan masalah, salah satunya kemacetan lalu lintas. Banyak masyarakat yang mengeluhkan perbaikan dan pengerjaan pemeliharaan infrastruktur yang tidak selesai. Seharusnya dinas terkait begitu sudah diketuk APBD langsung memproses dana tersebut, pengerjaan jalan menjelang akhir tahun akan mengganggu aktivitas warga dan progress lainnya serta terdapat proyek yang terbengkalai dan akhirnya menimbulkan masalah baru. Seperti jalan di Ciumbuleuit yang banyak dikeluhkan masyarakat. Sebaiknya pengerjaan dilakukan tidak saat memasuki musim penghujan karena dapat dipastikan hasilnya tidak maksimal dan tidak bertahan lama, harusnya perbaikan jalan tidak dilakukan saat musim hujan dan seharusnya sisa pengerjaan dibuang dan tidak meninggalkan sisa sehingga mengakibatkan kemacetan, kumuh, serta banjir.

Berdasarkan data DBMP merencanakan pemeliharaan di ruas jalan di Kota Bandung yaitu :

**Tabel 1.1**
**Program Pemeliharaan Pada 6 UPT Tahun 2012**

| No | Lokasi | Program M2 |
|---|---|---|
| 1. | UPT.OP.Bojonagara | 9,200.00 |
| 2. | UPT.OP.Cibeunying | 10,780.00 |
| 3. | UPT.OP.Tegallega | 11,614.00 |
| 4. | UPT.OP. Karees | 9,870.00 |
| 5. | UPT.OP.Ujungberung | 11,549.00 |
| 6. | UPT.OP.Gedebage | 13,220.00 |
| 7. | UPT.OP. PCA | - |
| Total | | 66,233,00 |

(Sumber: Data Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, 2013)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas program pemeliharaan yang akan dikerjakan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2012 ada enam UPT.OP. yaitu UPT.OP. Bojonagara jumlah program 9,200.00 M2, UPT.OP. Cibeunying jumlah program 10,780.00 M2, UPT.OP. Tegallega jumlah program 11,614.00 M2, UPT.OP. Karees jumlah program 9,870.00 M2, UPT.OP. Ujungberung jumlah program 11,549.00 M2, dan UPT.OP. Gedebage jumlah program 13,220.00 M2. Ruas jalan sepanjang 1.236 km, sebagian diantaranya merupakan jalan milik nasional sepanjang 43 km, dan milik provinsi 32 km. Jalan yang ada di Kota Bandung, sekitar 31,04% dalam kondisi rusak, 15,91% rusak ringan, dan 15,13% rusak berat dari 134 paket untuk jalan dan drainase.

**Gambar 1.2**
**Baru Saja Diperbaiki, Jalan Kembali Rusak**



Bandung – Baru saja diperbaiki namun jalan mulus yang diharapkan warga sudah kembali rusak, dengan kondisi sejumlah titik jalan berlubang dan batu kerikil berhamburan keluar aspal. Padahal jalan tersebut baru sekitar 6 bulan diperbaiki oleh instansi terkait. Rabu (13/3), di sekitar Jl. Maleber Barat Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung. Jalan terkesan tidak terurus batu kerikil berserakan kemana-mana, sementara kalau hujan tiba menimbulkan genangan. Menurut sejumlah keterangan, jalan Malaber Barat tersebut memang sudah diperbaiki, namun entah kenapa belum menginjak usia 4 – 6 bulan jalan sudah rusak kembali. Padahal beberapa petugas Dinas Bina Marga setempat sudah memperbaikinya.“Mungkin perbaikan jalannya, terburu-buru atau terlalu dipaksakan sehingga hasilnya tidak maksimal. Coba saja perhatikan lapisan aspalnya terlalu tipis,” tutur Oman (30) warga sekitar. Hal senada diungkap pula oleh warga lain yang melihat bahwa jalan tersebut diperbaiki pada saat musim hujan lalu. Ketika

> jalanan masih tergenang air petugas memperbaikinya dengan cara langsung menutup lobang-lobang jalan itu.“Padahal setau saya kalau tidak salah saat jalan dilapisi aspal dan kerikil jalanan harus sedang kering. Sehingga hasilnya akan bagus dan berkualitas, bukan seperti saat ini aspal nya tipis, jalan kembali berlubang dan batu kerikil berhamburan.” Papar Dedi (40) masih warga sekitar. Warga berharap perbaikan jalan Maleber Barat Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung itu, kembali diperbaiki Dinas Bina Marga Pemkot Bandung namun dengan kualitas dan syarat perbaikan jalan yang memenuhi standar kualitas bukan perbaikan jalan asal-asalan. Karena menurut mereka, sejauh ini warga selalu taat bayar pajak diantaranya harus diwujudkan melalui perbaikan jalan sebagai infrastruktur kota.
> Sumber: (http://pewarta-indonesia.com,12/03/13)

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat pada berita di atas jalan-jalan yang rusak sudah diperbaiki tetapi sekitar 6 bulan diperbaiki oleh instansi kembali rusak. Kualitas kerja aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan dipertanyakan, apakah sebenarnya aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan menggunakan anggaran secara efektif atau tidak, yang mengakibatkan perbaikan jalan dalam jangka pendek rusak lagi. Melihat dampak yang begitu luas dari kerusakan jalan maka pemerintah tidak dapat tinggal diam dan segera melakukan perbaikan atau pemeliharaan jalan khususnya pada beberapa luas jalan.

Dampak dari kurang baiknya kinerja aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah banyaknya program pemeliharaan jalan yang rusak di biarkan begitu saja tidak dikerjakan dengan baik. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Kinerja Aparatur Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung Dalam Program Pemeliharaan Jalan Di Kota Bandung”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk memperjelas fokus masalah yang akan ditulis dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah yaitu "Bagaimana Kinerja aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam melaksanakan program pemeliharaan jalan di Kota Bandung?".

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam melaksanakan program pemeliharaan jalan di Kota Bandung.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dalam melaksanakan program pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam melaksanakan program pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui keamanan dalam pelaksanaan program pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat Kota Bandung pelaksanaan program pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan peneliti, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan dan memahami kinerja aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam program pemeliharaan jalan.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.
3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk aparatur negara di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dilihat dari program pemeliharaan jalan di Kota Bandung.